PANDUAN PEMBACA

Daftar isi

Bab, lampiran, dan nomor halaman

Tentang edisi ini. . . . 2

01 Komponen penghasilan 5

02 Struktur dan dasar upah 6

03 BPJS untuk penerima upah 7

04 Contoh payroll terpadu 8

05 PPh 21 pegawai tetap 9

06 Rekonsiliasi tahunan 10

07 Bruto, neto, dan gross-up 11

08 THR keagamaan 12

09 Lembur 13

10 Natura dan fasilitas 14

11 Hak akhir hubungan kerja 15

12 PHK dan pengali 16

13 PKWT dan pekerja keluar 17

14 SOP payroll bulanan 18

15 Coretax dan bukti potong 19

16 Saat terutang dan arsip 20

17 PPh 21 DTP tahun 2026 21

Lisensi personal — dilarang menyebarluaskan tanpa izin pemegang hak

PRATINJAU GRATIS - TOKO86 - Edisi 1 v1.3 | Bukan buku lengkap

Daftar isi (lanjutan)

18 Upah minimum dan perubahan hukum 22
19 Pelindungan data payroll 23
20 Marketplace dan payroll 24
21 Kasus masuk dan resign 25
22 Jurnal dan rekonsiliasi 26
23 Daftar periksa bulanan 27
24 Glosarium 28
A Lampiran: tabel TER kategori A 29
B Lampiran: tabel TER kategori B 31
C Lampiran: tabel TER kategori C 33
Daftar sumber 35
Identitas edisi dan pembaruan 39

Lisensi personal — dilarang menyebarluaskan tanpa izin pemegang hak

PRATINJAU GRATIS - TOKO86 - Edisi 1 v1.3 | Bukan buku lengkap

BAB 04

04

Contoh *payroll* terpadu

Satu bulan biasa, metode bruto, TER kategori B

Budi berstatus K/1 dan bekerja penuh selama sebulan. Upah pokok Rp7.000.000, tunjangan tetap Rp500.000, dan uang makan/transport berbasis kehadiran Rp500.000. Tidak ada THR, bonus, natura kena pajak, lembur, atau fasilitas PPh 21 DTP. Tingkat risiko JKK diasumsikan 0,24%. Dasar upah BPJS Rp7.500.000 dengan tarif standar.

Perhitungan	Nilai
Penghasilan bruto tunai	Rp8.000.000
JKN 1% / JHT 2% / JP 1% (pegawai)	Rp75.000 / Rp150.000 / Rp75.000
Total potongan BPJS pegawai	Rp300.000
JKN 4% / JKK 0,24% / JKM 0,3% (perusahaan)	Rp300.000 / Rp18.000 / Rp22.500
Tambahan bruto fiskal dari ketiganya	Rp340.500
Bruto PPh 21	Rp8.340.500
PPh 21: TER B 1% × bruto PPh 21	Rp83.405
THP = Rp8.000.000 – Rp300.000 – Rp83.405	**Rp7.616.595**
JHT 3,7% dan JP 2% (perusahaan)	Rp277.500 + Rp150.000
Total iuran perusahaan	Rp768.000
CTC bulan contoh	**Rp8.768.000**

Iuran JKN, JKK, dan JKM yang dibayar pemberi kerja menambah penghasilan bruto PPh 21, sedangkan iuran JHT dan JP bagian perusahaan tidak. Itulah sebabnya bruto fiskal berbeda dari jumlah bruto tunai pada slip gaji.

> **Bruto tunai, bruto fiskal, dan CTC memiliki dasar yang berbeda. Telusuri setiap angka ke komponennya sebelum membandingkannya dengan slip gaji atau tagihan.**

Dasar hukum: PMK 168/2023; Ketentuan iuran BPJS Ketenagakerjaan; PP 6/2025; Perpres 82/2018 dan perubahannya; Surat BPJS Ketenagakerjaan B/1226/022026

Lisensi personal — dilarang menyebarluaskan tanpa izin pemegang hak

PRATINJAU GRATIS - TOKO86 - Edisi 1 v1.3 | Bukan buku lengkap

LAMPIRAN A

Tabel TER kategori A

Status TK/0, TK/1, K/0 · bagian 1 dari 2

Tarif efektif bulanan untuk masa pajak selain masa terakhir. Batas atas termasuk dalam lapisan; batas bawah tidak termasuk. Angka dalam rupiah.

No.	Penghasilan bruto fiskal sebulan	TER
1	Sampai Rp5.400.000	0%
2	Rp5.400.000 < bruto ≤ Rp5.650.000	0,25%
3	Rp5.650.000 < bruto ≤ Rp5.950.000	0,5%
4	Rp5.950.000 < bruto ≤ Rp6.300.000	0,75%
5	Rp6.300.000 < bruto ≤ Rp6.750.000	1%
6	Rp6.750.000 < bruto ≤ Rp7.500.000	1,25%
7	Rp7.500.000 < bruto ≤ Rp8.550.000	1,5%
8	Rp8.550.000 < bruto ≤ Rp9.650.000	1,75%
9	Rp9.650.000 < bruto ≤ Rp10.050.000	2%
10	Rp10.050.000 < bruto ≤ Rp10.350.000	2,25%
11	Rp10.350.000 < bruto ≤ Rp10.700.000	2,5%
12	Rp10.700.000 < bruto ≤ Rp11.050.000	3%
13	Rp11.050.000 < bruto ≤ Rp11.600.000	3,5%
14	Rp11.600.000 < bruto ≤ Rp12.500.000	4%
15	Rp12.500.000 < bruto ≤ Rp13.750.000	5%
16	Rp13.750.000 < bruto ≤ Rp15.100.000	6%
17	Rp15.100.000 < bruto ≤ Rp16.950.000	7%
18	Rp16.950.000 < bruto ≤ Rp19.750.000	8%
19	Rp19.750.000 < bruto ≤ Rp24.150.000	9%
20	Rp24.150.000 < bruto ≤ Rp26.450.000	10%
21	Rp26.450.000 < bruto ≤ Rp28.000.000	11%
22	Rp28.000.000 < bruto ≤ Rp30.050.000	12%

Kalikan tarif dengan seluruh bruto fiskal masa tersebut, bukan hanya selisih di atas batas. Tarif progresif tahunan dipakai pada rekonsiliasi masa terakhir.

Dasar hukum: PP 58/2023 Lampiran A

Lisensi personal — dilarang menyebarluaskan tanpa izin pemegang hak

PRATINJAU GRATIS - TOKO86 - Edisi 1 v1.3 | Bukan buku lengkap